

MENGAJI REVOLUSI MENTAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

MENTAL REVOLUTION WITHIN EDUCATIONAL CONTEXTS

Bambang Indriyanto
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud
Komplek Kemdikbud, Gedung E Lt. 19
e-mail: bambang.indriyanto14@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 29/11/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 4/12/2014; Disetujui tanggal: 21/12/2014

Abstract: *The objective of this article is to assess the meaning of mental revolution within educational context from two perspectives namely citizenship education and the national education system. In this article, the proposition purposed is that the citizenship education as a part of the national education system. In order to materialize the efficacy of citizenship, education roles of teachers are enhanced by including transferring, transforming, and transcending roles. With these three roles, education outcomes will lead to the establishment of Indonesian to become productive and democratic, as well as are able to preserve social harmonies. To achieve both the objectives of education system as well as citizenship education, curriculum serves as a reference and direction for teachers in the articulation of concepts of subject matters.*

Keywords: *characters, mental, teacher professionalism, dimensions of education, citizenship education.*

Abstrak: *Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji makna revolusi mental dalam konteks pendidikan dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan sistem pendidikan nasional. Pada tulisan ini proposisi yang diajukan adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkan kemandirian pendidikan kewarganegaraan peran guru diperluas dengan mencakup peran transferring, transforming, dan transcending. Dengan ketiga peran ini, hasil pendidikan dalam arti outcome dapat mendorong pembentukan manusia Indonesia yang produktif dan bersikap demokratis serta mampu memelihara harmonisasi kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan sistem pendidikan pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya, kurikulum berperan sebagai rujukan dan arah bagi guru dalam mengartikulasikan konsep-konsep yang terkandung dalam mata pelajaran.*

Kata kunci: *karakter, mental, profesionalisme guru, dimensi pendidikan, pendidikan kewarganegaraan.*

Pendahuluan

Pada harian Kompas 10 Mei 2014, Presiden Jokowi, yang pada waktu itu masih menjadi calon presiden, menulis sebuah artikel dengan judul "Revolusi Mental" (Widodo, 2014). Argumentasi yang dikemukakan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik, tidak hanya pada perubahan institusi, melainkan juga perubahan pada manusia. Namun dalam kampanye menjadi presiden kata revolusi mental tidak secara eksplisit tetapi muncul dalam visi dan misi dalam bentuk Nawa Cita. Jika kata mental diasumsikan

mempunyai kesamaan makna dengan karakter maka revolusi mental tersebut tersirat dalam Cita nomor 8 yang berbunyi "kami akan melakukan revolusi karakter bangsa". Nawa ini dijabarkan menjadi lima strategi. Di antara lima strategi tersebut yang relevan dengan topik bahasan pada tulisan ini adalah "membangun pendidikan kewarganegaraan, mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, dan jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil".

Berbagai pendapat mencoba untuk menginterpretasikan revolusi mental. Bagir (2014) melihat revolusi mental merupakan bagian dari kebudayaan. Dari sudut pandang ini, maka revolusi mental merupakan perubahan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yang menjadi panutan dalam berperilaku. Sudut pandang serupa, namun lebih makro, dikemukakan oleh Abduhzein (2014) yang juga menekankan pada perubahan perilaku berdasarkan pada suatu sistem nilai. Dalam argumentasinya, intervensi yang perlu dilakukan adalah strategi kebudayaan dan pendidikan. Khusus berkenaan dengan pendidikan adalah pendidikan karakter. Dengan menekankan pada konteks revolusi dalam orientasi nilai budaya, Massardi (2014) mengemukakan bahwa revolusi merupakan perubahan fundamental dan cepat.

Revolusi mental memang berkaitan dengan karakteristik kepribadian manusia yang direfleksikan dalam perilaku, sehingga terminologi revolusi mental praktis dapat berkaitan dengan berbagai bidang sepanjang bidang tersebut melibatkan peran manusia di dalamnya. Oleh karena itu, menjadi tetap relevan jika Avianni (2014) menjadikan revolusi mental sebagai momentum untuk mengubah perilaku para politisi yang bermain kotor untuk menjadi sikap mendukung sistem (politik) yang demokratis.

Dalam ranah disiplin Psikologi, mental dan karakter merupakan dua konsep yang bersifat menjelaskan dua fenomena dari satu entitas yang disebut kepribadian. Dalam teks Psikologi, mental berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan. Oleh karena itu, pembahasan berkenaan dengan mental memusatkan pada kesehatan mental (*mental health*) dan ketidakseimbangan mental (*mental disorder*). Di sisi lain, karakter mencerminkan perilaku atau penampilan fisik dari seseorang. Dalam konteks ini, perilaku atau penampilan fisik bergantung pada kemampuan mempersepsikan terhadap nilai budaya yang berlaku pada satu kesatuan masyarakat (Strickland, 2001; Farenga & Ness, 2005).

Meskipun terdapat perbedaan antara konsep mental dan karakter, namun tulisan ini merujuk pada Cita nomor 8 yang berbunyi "kami akan melakukan revolusi karakter bangsa". Untuk itu, perspektif pendidikan dipusatkan pada sistem

pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya. Penyajian perbedaan konsep pada tulisan ini dimaksud sebagai titik tolak komparatif tentang konsep mental dan karakter. Inferensi yang diambil dari perbedaan tersebut, dengan mempertimbangkan Cita nomor 8, lebih dekat pada perubahan karakter.

Berdasarkan pada argumentasi di atas, tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji makna revolusi mental dalam konteks pendidikan dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan sistem pendidikan nasional. Pada tulisan ini proposisi yang diajukan adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ketika pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian sistem pendidikan nasional, maka tidak merupakan mata pelajaran melainkan dapat berupa kelompok mata pelajaran atau sebagai suatu program pendidikan yang tujuannya membangkitkan kesadaran siswa tentang posisinya sebagai warga negara Indonesia. Berkaitan dengan proposisi bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu program, maka menjadi relevan untuk mengentengahkan peran guru sebagai pendidik, bukan sebagai pengajar mata pelajaran.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang arah sistem pendidikan. Pembahasan ini akan menggunakan perspektif filosofis. Bagian ini menjadi titik tolak untuk membahas pendidikan kewarganegaraan dan peran guru. Oleh karena itu, pembahasan tentang program pendidikan kewarganegaraan dan peran guru menjadi bagian kedua dan ketiga.

Kajian Pustaka

Tujuan Sistem Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk mengantarkan siswa menjadi orang yang lebih berkompeten. Dalam konteks ini, kompeten tidak hanya berarti mempunyai prestasi akademis yang tinggi, melainkan juga menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dirinya sebagai warga negara suatu bangsa atau individu sebagai bagian dari kesatuan sosial masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pendidikan berkompeten diukur dari dua indikator yaitu *output*

dan *outcome*. *Output* merupakan hasil langsung dari kegiatan belajar yang berlangsung pada periode tertentu. Indikator *output* adalah prestasi akademis dan perubahan perilaku. *Outcome* merupakan perubahan cara berpikir dan berperilaku setelah mengikuti proses pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator *outcome* adalah profesionalisme, prestasi pada jenjang pendidikan lebih lanjut, tingkat pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari keterampilan/keahlian dari proses pendidikan (Windham & Chapman, 1990).

Namun proses pendidikan tidak berlangsung dalam isolasi karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses interaksi antara guru sebagai sumber informasi dengan siswa sebagai pihak penerima informasi (Indriyanto, 2014). Proses interaksi merupakan bagian keseharian dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial oleh karena itu "*Human life is group life, and concerted action arises out of the ability of persons to be objects of both their own activity and others*" (Denzin, 2005). Makna dari pernyataan ini jika ditransformasikan dalam proses pendidikan yang berlangsung di ruang kelas adalah bahwa pendidikan harus berlangsung dalam suatu kelompok. Kegiatan yang tercipta dalam suatu proses interaksi tersebut dapat menjadi obyek pembelajaran bersama atau obyek pembelajaran secara individual. Meskipun konteks penjelasan di atas lebih mencerminkan suasana proses pendidikan dalam kelas yakni pendidikan jalur formal, namun penjelasan di atas juga dapat dijadikan rujukan dalam memaknai proses pendidikan yang terjadi pada jalur nonformal. Dalam hal ini ruang kelas tidak semata-mata dimaknai sebagai bangunan yang menjadi bagian dari gedung sekolah, tetapi ruang kelas yang mencerminkan sebagai suatu lembaga yang memungkinkan proses pendidikan dapat berlangsung.

Dalam konteks yang lebih luas kebermaknaan proses pendidikan dapat diinterpretasikan ketika terdapat kesepakatan antara guru di satu pihak dan kelompok siswa di lain pihak. Secara konvensional pembahasan tentang tujuan pendidikan cenderung didasarkan pada taksonomi Bloom. Berdasarkan pada taksonomi ini ranah pendidikan meliputi kognitif, afektif, dan psi-

komotorik. Kemajuan dalam berbagai kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat tidak menggoyahkan tujuan pendidikan pada tiga ranah ini. Perbedaan terletak pada substansi dari masing-masing ranah.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditekankan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa tentu terkait dengan peran sistem pendidikan nasional. Menjadi manusia yang cerdas sebagai konsekuensi dari upaya Pemerintah Indonesia tidak lepas dari konteks kebudayaan yang berlaku dalam ke-Indonesian. Hal itulah yang dapat diinterpertasikan dari pendapat Ki Hadjar Dewantara dari argumentasinya tentang pengembangan sistem pendidikan. Dalam argumentasi ini, pesan yang disampaikan adalah bahwa mendidik tidak bisa bebas dari konteks, meskipun di lain pihak mendidik harus menjamin kemerdekaan berpikir dan tidak terbelenggu pada tekanan kebatinan.

Dalam makna yang sama tetapi dengan ungkapan yang berbeda Dewey (2001) mengajukan tiga kriteria untuk menyatakan bahwa pendidikan dikatakan baik. Pertama, tujuan pendidikan harus berkembang dari kondisi yang ada sekarang (*current*). Tujuan pendidikan pada dasarnya tidak statis. Jika hal tersebut terjadi, niscaya pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan menjadikan manusia menjadi individu yang mandiri. Kedua, berkaitan dengan tujuan pertama pendidikan bersifat fleksibel. Dalam konotasi ini tujuan pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial "lokasi" sistem pendidikan. Ketiga, tujuan pendidikan memberikan ruang kebebasan baik dalam berpikir maupun bertindak untuk lebih mengembangkan potensi bagi guru dan siswa dalam menjalankan proses pendidikan secara kolaboratif antara kedua belah pihak. Argumentasi Dewey ini dikemukakan berdasarkan pada pendapatnya bahwa: "*the aim of education is to enable individuals to continue their education or that the object and reward of learning is continued capacity for growth*" (Dewey, 2001). Pendidikan yang mempunyai

jaminan fleksibilitas akan mendorong pada kreativitas siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber belajar yang menstimulasi daya pikirnya untuk mendorong dirinya mengembangkan potensi intelektualismenya menjadi suatu buah pikir yang kelak menjadi bekal dalam memasuki kehidupan nyata dalam masyarakat. Namun kebebasan dalam proses pendidikan tidak mempunyai makna yang sama dengan liberalisasi. Dalam konteks kebebasan masih ada peran pengendalian baik oleh guru maupun sistem manajemen pada tingkat sekolah (Buchen, 2000).

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan diri manusia dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Dalam konteks ini, perubahan tidak hanya pada pola berpikir melainkan juga pada perubahan perilaku. Kombinasi dari pola berpikir dan perilaku, menurut argumentasi Peters (1972) merupakan perwujudan karakter. Meskipun demikian, dia mengemukakan bahwa proses pendidikan bukan merupakan proses reformasi pada diri manusia. Alasan yang dikemukakan adalah pendidikan tidak mengubah manusia dari kondisi salah menjadi kondisi benar. Proses pendidikan adalah meningkatkan kemampuan manusia menjadi lebih mampu dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya. Pengertian pendidikan sebagai proses reformasi seolah-olah mengubah manusia dari tidak bernalar menjadi manusia yang bernalar. Proses pendidikan menanamkan nilai kepada manusia. Dengan nilai manusia didorong untuk berpikir berdasarkan suatu sistem nilai yang berlaku. Oleh karena itu, dia mengemukakan bahwa *"The notion, therefore, of being 'educated' has become contingently but firmly associated with knowledge and understanding"* (Peters, 1972).

Merujuk pada pembukaan UUD 1945 yang menjadi arah perumusan tujuan pendidikan maka sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia tidak bisa steril dari konteks kebudayaan dan sistem nilai yang berlaku di Indonesia. Proses penalaran melalui proses pendidikan mengarahkan setiap peserta didik menjadi manusia Indonesia yang cerdas melalui proses berpikir. Melalui proses pendidikan setiap manusia Indonesia yang terdidik mempunyai tingkat sensitivitas terhadap

lingkungannya dan mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupannya, ke-luarganya, dan bangsanya. Semua ini telah dirumuskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) sebagai berikut:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk menjamin ketercapaian tujuan tersebut (UU 20/2003) juga telah memberikan pedoman yang dirumuskan pada Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Penjaminan mutu merupakan pendekatan untuk merealisasikan pencapaian tujuan pendidikan seperti yang dipesankan oleh Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut. Dalam pembahasan berikut

penjaminan mutu akan diketengahkan dalam dua subtopik program pendidikan kewarganegaraan dan peran guru.

Program Pendidikan Kewarganegaraan

Titik tolak pembahasan tentang program pendidikan Kewarganegaraan adalah Pasal 5 (ayat 1) UU 20/2003 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Dengan adanya hak yang dimiliki oleh setia warga negara (bukan anggota masyarakat) maka sistem pendidikan nasional berfungsi untuk memberdayakan setiap warga negara untuk dapat berperan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pengertian seperti itu maka pendidikan kawarganegaraan yang menjadi topik bahasan pada subtopik ini bukan dalam arti *civic education* tetapi *citizenship education* (Richardson, 2008).

Kesadaran setiap individu terhadap status kewarganegaraannya membawa konsekuensi hak dan kewajiban. Konsekuensi hak mengandung makna, bahwa setiap warga negara dapat berperan dalam kehidupan bernegara secara demokratis tanpa terjerat dalam suatu dogma yang bersifat kaku (Dewey, 2001; Nelson, 2001; Farenga & Ness, 2005). Dalam konteks globalisasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara dan berbangsa mendorong program pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk mengembangkan identitas kebangsaan. Globalisasi yang berlangsung pada saat ini masih mengarah pada kompetisi yang terjadi antara negara yang secara langsung mengarah pada kompetisi antara warga negara dari berbagai negara, belum mengarah pada kehidupan bersama yang demokratis. Giddens menyebutnya, sebagaimana dikutip oleh Richardson (2008), sebagai *democratic deficit*.

Dengan kompetensi yang dimiliki melalui proses pendidikan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk memberikan sumbangannya pada lingkungan sosial terdekatnya yaitu keluarga, lingkungan kemasyarakatan, sampai negara. Dalam terminologi ekonomi sumbangan seorang berpendidikan terhadap pihak lain (keluarga, satuan masyarakat, maupun negara) disebut dengan *externality*. Efek *externality* tidak

harus dalam bentuk sumbangan ekonomi melainkan juga dalam bentuk penjaminan kehidupan sosial harmonis dan kehidupan politik yang demokratis. Khusus sumbangan secara ekonomi adalah kesejahteraan kehidupan keluarga dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perwujudan dari sumbangan individu berpendidikan berupa partisipasi dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini kompetensi dalam bentuk kemampuan intelektual tidak menjamin partisipasi seorang warga negara berpendidikan untuk memberikan sumbangannya untuk meningkatkan kemakmuran dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat tanpa disertai dengan karakter. Kombinasi antara intelektualisme dan karakter merupakan satu kesatuan dari dua entitas yang dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan partisipasinya. Dengan intelektualisme warga negara mengembangkan kemampuan melakukan analisis terhadap kondisi yang terjadi di sekitar mereka atau dalam teritori suatu negara, dan karakter memberikan sentuhan simpati dan empati pada kondisi yang terjadi tersebut.

Kata sumbangan sebagai dasar partisipasi warga negara terhadap kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat harus selalu berkonotasi positif. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek yang diketengahkan, yaitu aspek sosiologis, politik, dan ekonomi. Dengan mengetengahkan tiga aspek tidak berarti bahwa ketiga aspek tersebut merupakan *exhaustive list* segi positif sumbangan warga negara terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Aspek Sosiologis. Dari perspektif sosiologi kehidupan bersama merupakan refleksi dari sistem interaksi antarindividu dengan berbagai latar belakang sosial. Konsekuensinya, perbedaan berbagai latar belakang menyajikan suatu fenomena pluralisme, dan fenomena tersebut merupakan suatu realitas sosial. Dalam argumentasi *plurealism* dari Israel Scheeffler, realitas sosial bersifat mandiri dalam arti tidak bisa diintervensi (*independent*) dan utuh (*irreducible*) dalam arti tidak bisa diubah-ubah apalagi dikurangi (Holma, 2004). Dalam konotasi yang berbeda dapat dikatakan bahwa realitas tidak bisa

diubah oleh pengetahuan karena pengetahuan berperan mengungkap realitas sosial, secara bersamaan pengetahuan juga bebas dari nilai yang terkandung dalam realitas sosial tersebut (Moore & Muller 1999).

Pengetahuan yang diperoleh dari suatu proses pendidikan merupakan sarana untuk memahami realitas sosial yang terjadi. Dalam proses pemahaman, setiap individu menyadari tentang kelemahan dari setiap jengkal realitas sosial (dimensi intelektualisme) dan sekaligus berupaya untuk membangun strategi meningkatkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama (dimensi karakter).

Harmonisasi kehidupan bersama baik dalam konteks kehidupan bernegara maupun bermasyarakat merupakan suatu fenomena yang tidak terjadi secara alamiah. Kehidupan harmonis merupakan suatu kondisi yang diciptakan berdasarkan pada interpretasi warga negara terhadap realitas sosial yang ada. Etika menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya suatu kondisi harmonis. Hal ini karena etika bertujuan *"To foster principles of interaction that induce people to act for the general welfare and the common good"* (Rescher, 2002).

Dalam konsep etika, yakni ketika arahnya untuk membangun *general welfare and the common good*, terdapat faktor keadilan yang harus menjadi kesepakatan bersama. Dalam upaya mencapai kesepakatan bersama, terdapat proses rekonsiliasi kepentingan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam membangun kehidupan harmonis bersama. Arah dari rekonsiliasi adalah mengubah kepentingan yang sama (*like interest*) menjadi kepentingan bersama (*common interest*).

Dinamika kehidupan sosial menjadi harmonisasi akan selalu berubah menuju suatu perkembangan sesuai dengan aspirasi warga negara suatu bangsa. Konsekuensinya proses rekonsiliasi dari *like interest* menuju *common interest*, akan menjadi suatu proses yang akan bergerak dari suatu fase ke fase berikutnya.

Aspek politik. Harmonisasi kehidupan bersama baik dalam konteks kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat, dari aspek politik, sebagai mana aspek sosiologis, juga mempertimbangkan faktor kepentingan. Perbedaannya

terletak bagaimana kepentingan tersebut muncul pada permukaan kehidupan bersama. Dalam perspektif sosiologis kepentingan muncul sebagai konsekuensi interaksi antaranggota masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya stratifikasi kelas sosial (Di tella, 1985; Rescher, 2002). Di lain pihak, sudut pandang politik lebih menekankan bahwa kepentingan sebagai titik tolak keseimbangan untuk mencapai keadilan. Hal ini nampak jelas ketika kepentingan diletakkan dalam perspektif *Rawl Positivism*. Dalam kepentingan memang merupakan suatu kondisi yang harus dan selalu ada dalam satu kesatuan sosial. Kesatuan sosial tidak akan mempunyai makna dan tidak bersifat dinamis tanpa adanya kepentingan. Oleh karena itu, permasalahannya adalah bukan ada atau tidaknya kepentingan dalam kesatuan sosial tersebut, tetapi adanya keseimbangan yang mempertimbangkan dua kondisi secara bersama yaitu *"the right and the good"* (Farrelly, 2004). John Rawl mengelaborasi lebih lanjut kondisi *the right and the good* dalam konsep *two principle of justice* sebagai berikut:

"First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all". (Rawl, 1999)

Dalam skenario yang lebih umum, konsep *two principle of justice* terwujud dalam kehidupan yang demokratis. Dalam konteks ini demokratis tidak hanya berarti suara terbanyak tetapi pada pencapaian kriteria *the right and the good*. Argumentasi yang dikemukakan oleh Yeager dan Silva (2002) serta Westheimer & Kahne (2004) demokrasi terrefleksi dalam karakter warga negara yang bertanggung jawab dan toleran, serta adil. Dalam hal demokrasi lebih menekankan pada karakter warga negara. Jika karakter ini dapat terwujud dalam setiap warga negara, harmonisasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dapat dicapai.

Dalam alam demokrasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan bersikap adil merupakan proses yang tidak dapat dicapai dalam jangka pendek. Dalam konteks pendidikan

suasana demokratis ini dimulai dalam kegiatan belajar mengajar yang terjadi di ruang kelas. Ketika sikap demokratis terbentuk melalui kegiatan belajar mengajar di kelas terdapat suatu proses "negosiasi" antara guru yang menanamkan suatu nilai demokrasi dengan siswa yang mempunyai *vested interest*. Dalam proses negosiasi terdapat dua nilai yang dinegosiasikan, yakni antara kebebasan (*freedom*) dengan kebijaksanaan (*virtue*). Dalam proses demokratisasi pada dasarnya terdapat dua hal yang menurut Perrin (2005) dan Pybas (2004) merupakan dua sisi dari satu mata uang yang mewarnai ranah demokrasi, yaitu *freedom* dan *virtue*.

Dalam proses pembentukan sikap demokratis setiap pihak diberikan hak untuk menggunakan *freedom* sebagai sarana untuk mengekspresikan kepentingannya. Namun, untuk mencegah sikap authoritarian dalam mengekspresikan kepentingannya setiap pihak yang terkait dalam suatu kesatuan sosial yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan perlu untuk mempertimbangkan *virtue* dalam proses negosiasi. Dalam proses ini demokratisasi dapat juga diartikan sebagai upaya untuk mencapai konsensus.

Karakter untuk menghargai kepentingan orang lain memerlukan tenggang rasa, simpati, dan empati bahwa pihak lain juga mempunyai kepentingan yang diekspresikan atau bahkan diartikulasikan. *Freedom* yang disertai dengan *virtue* untuk mencapai kesepakatan, kepentingan bersama dapat difasilitasi. Dalam kondisi ini posisi *win-win solution* dapat dicapai. Posisi *win-win solution* bukan merupakan kondisi absolut terhadap masing-masing pihak yang memang dalam kondisi menang. *Win-win solution* merupakan kondisi relatif, ketika satu pihak dalam posisi menang, pihak lain harus mengalah dalam arti merelakan sebagian kepentingannya untuk kepentingan pihak lain, dan dalam kasus lain pihak yang pada satu kasus menang pada kasus lain harus merelakan sebagian kepentingannya kepada pihak lain.

Aspek ekonomi. Dimensi karakter dalam sudut pandang ekonomi memusatkan perhatiannya pada kemampuan memproduksi dari setiap individu yang berpendidikan. Dalam sudut

pandang ekonomi pendidikan, setiap alokasi anggaran untuk mendidik setiap individu merupakan suatu bentuk investasi. Setiap investasi yang dilakukan baik pada diri manusia maupun barang selalu diharapkan akan memberikan nilai balik. Dalam konteks pendidikan nilai balik bagi investasi kepada manusia berupa *profit* dan *benefit*. Nilai balik dalam bentuk *profit* diukur dengan pendapatan (*earning*) yang diperoleh sepanjang hidupnya sejak dia menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu. *Benefit*, di lain pihak diukur dengan besarnya kemaslahatan yang diberikan individu kepada lingkungan sosial dengan jenjang pendidikan tertentu. Seperti yang telah dinyatakan di atas kemaslahatan ini disebut dengan *externality* yang mulai nampak ketika hasil pendidikan diukur dengan *outcome* (Windham & Chapman, 1990).

Berkenaan dengan adanya nilai balik Behrman & Birdsall (1987) serta Vandenberghe (1999) mempunyai pandangan yang sama bahwa pendidikan memang merupakan bentuk investasi. Perbedaan dari keduanya terletak pada kondisi yang memungkinkan pendidikan memberikan nilai balik secara optimal baik kepada individu yang mempunyai pendidikan pada jenjang tertentu maupun terhadap lingkungannya (*externality*). Behrman & Birdsall (1987), dengan membandingkan nilai balik dari berbagai negara, cenderung mengatakan, bahwa nilai balik yang dihasilkan dari investasi pada pendidikan merupakan suatu proses yang linear, dalam arti tidak dipengaruhi oleh faktor latar belakang siswa ataupun kondisi ekonomi. Hal ini tidak demikian menurut argumentasi yang dikemukakan oleh Vandenberghe (1999) yang berpendapat bahwa investasi tidak secara langsung hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana pada pendidikan, tetapi ada juga faktor *nonmonetary* yang juga ikut berpengaruh. Dengan kata lain, dia juga mempertimbangkan faktor nonekonomi atau lebih tepatnya faktor psikologi dan juga sosiologi dalam memperkirakan besarnya nilai balik dari investasi terhadap manusia melalui proses pendidikan. Faktor psikologi yang dimaksud adalah motivasi dan kepribadian. Faktor sosiologi adalah status ekonomi sosial dan orientasi budaya. Berdasarkan argumentasi ini dapat dikatakan, bahwa setiap individu yang mempunyai jenjang pendidikan yang

sama belum tentu memberikan nilai balik yang setara kepada individu yang bersangkutan, jika motivasi berbeda atau berasal dari status ekonomi sosial yang berbeda.

Tambunan (2000) memberikan ilustrasi yang berbeda terhadap optimalisasi nilai balik terhadap investasi pada pendidikan. Dengan menggambarkan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke arah desentralistik pada pemerintahan Indonesia, serta masuknya Indonesia pada pasar global dapat mengubah kesempatan setiap individu dengan jenjang pendidikan tertentu mencapai nilai balik secara optimal. Desentralisasi dapat meningkatkan atau menurunkan daya serap pasar kerja terhadap mereka yang berpendidikan. Dalam konteks yang sama, globalisasi dalam pasar mempersempit kesempatan kerja domestik bagi orang Indonesia ketika terjadi hegemoni ekonomi oleh negara lain atas pasar kerja di Indonesia.

Pendidikan karakter memang meningkatkan orientasi setiap individu untuk melakukan investasi pada bidang pendidikan. Nilai balik, terutama dalam arti profit, akan menjadi tantangan tersendiri ketika terdapat konstelasi pasar kerja yang tersedia sebagai akibat dari perubahan sistem pemerintahan dan keikutsertaan Indonesia dalam pasar global. Motivasi tetap menjadi faktor pendukung terhadap kompetensi jika seseorang dengan jenjang pendidikan tertentu masuk dalam persaingan pasar kerja. Dalam realitasnya pasar kerja tidak akan menjemput calon tenaga kerja, tetapi yang pasti akan menyediakan kesempatan secara *fair* kepada semua orang. Prinsip Darwinisme akan berlaku dimana mereka yang lebih sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pasar kerja adalah mereka akan mendapat kesempatan memasuki pasar kerja lebih dulu dan lebih cepat. Di samping itu, mereka yang lebih cocok dengan persyaratan yang dituntut oleh pasar kerja akan bertahan lebih lama dibanding dengan mereka yang tidak cocok dengan persyaratan kerja. Kecocokan dengan pasar kerja tidak hanya pada tingkat kompetensi melainkan juga motivasi, terutama motivasi untuk berprestasi dan berkompetisi.

Peran Guru

Dalam setiap proses pendidikan guru selalu menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa guru adalah aktor utama dalam proses belajar. Untuk menjamin efektivitas pencapaian target proses belajar, profesionalisme menjadi kata kunci. Dalam konteks ini, terminologi profesionalisme tidak hanya merujuk pada kompetensi tetapi juga pada orientasi ke depan untuk maju. Untuk meningkatkan profesionalisme, Suharno (2013) guru MTs Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat berpendapat bahwa penekanan diarahkan pada penguasaan metode belajar dan bukan pada penguasaan materi. Argumentasi ini dapat dipahami karena penguasaan metode mendorong guru untuk mencari cara-cara inovatif untuk melakukan eksplorasi materi materi pengajaran. Argumentasi tersebut mempunyai keterkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Denicolo & Pope (2005) terutama ketika profesionalisme merupakan suatu kedudukan yang berbeda (*distinct*). Perbedaan tersebut bukan ditandai dengan status tetapi pada kegiatan yang dilakukan untuk menjamin statusnya. Di samping itu, untuk mempertahankan posisi profesionalisme guru, tentu menuntut guru untuk selalu melakukan pembaharuan baik dalam hal metode belajar maupun substansi yang akan diajarkan (Kumar, 2006). Namun, keberhasilan dari semua upaya yang dilakukan oleh guru bukan pada peningkatan kompetensi guru itu sendiri, melainkan juga pada peningkatan kompetensi siswa dari berbagai dimensi prestasi belajar (Indriyanto, 2014).

Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, pemerintah telah melakukan intervensi yang terdiri dari pengembangan sistem insentif dan sistem pelatihan. Kedua sistem ini merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan peran guru dalam mengembangkan metode belajar dan meningkatkan penguasaannya terhadap materi yang diajarkan.

Penyelenggaraan program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mempunyai dua argumentasi yang keduanya berada dalam ranah kebijakan publik. Pertama, peningkatan guru merupakan tanggung jawab

pemerintah karena penyelenggaraan program pelatihan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pedagogis setiap siswa secara nondiskriminatif. Dalam tema kebijakan pendidikan, peningkatan mutu merupakan salah satu tema kebijakan *perennial* di samping peningkatan akses dan relevansi. Salah satu program peningkatan mutu, terutama berkenaan dengan implementasi Kurikulum 2013, adalah pelatihan guru.

Kedua, pelatihan guru merupakan modal awal (*initial endowment*) bagi guru untuk melakukan pengembangan kompetensinya lebih lanjut. Argumentasi yang diajukan di sini adalah bahwa pelatihan tidak hanya untuk tujuan pengembangan kemampuan dengan menambah pengetahuan dan keterampilan guru melainkan juga merupakan sarana untuk memberikan inspirasi kepada guru. Inspirasi ini akan membangkitkan kesadaran para guru tentang perlunya melakukan eksplorasi pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut. Pengetahuan yang dimiliki sebagai hasil dari pelatihan mempunyai keterkaitan dengan pengetahuan yang lebih maju (*advance*).

Pembahasan selanjutnya tentang peran guru diarahkan pada tiga peran, yaitu peran *transferring* dan *transforming*, serta *transcending*. Ketiga peran tersebut didasarkan pada suatu proposisi bahwa penyampaian materi kurikulum oleh guru kepada siswa tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek akademik dari setiap topik bahasan dalam suatu mata pelajaran, melainkan juga terdapat pengembangan karakter di dalamnya. Oleh karena itu, pembangunan karakter merupakan bagian dari pembenahan kurikulum. Kebijakan pengembangan karakter melalui pembenahan kurikulum juga menjadi strategi intervensi kebijakan peningkatan mutu di Cina. Dalam upaya melakukan peningkatan mutu melalui pembenahan kurikulum ditekannya bahwa isi kurikulum untuk membangun orientasi ke depan dan jiwa kompetitif untuk menunjang perkembangan ekonomi negara Cina (Iacovo, 2009). Pada konteks yang lebih mikro, Atwater (2010) memberikan ilustrasi bahwa pelajaran sains juga memuat misi kultural yang dapat memberikan kesadaran kepada para siswa tentang bagaimana dan di mana mereka hidup.

Peran transferring. Ketika guru melakukan tugas mengajar di depan kelas, pesan yang secara konvensional dipahami oleh siswa dan juga orang tua siswa adalah menjadikan siswa mempunyai prestasi akademis. Hal ini menjadi suatu kewajiban karena fenomena kegiatan belajar mengajar yang nampak secara visual adalah guru sedang menjelaskan serangkaian konsep yang dijabarkan dari suatu mata pelajaran dan orientasi ini telah menjadi dasar kebijakan untuk pengembangan pendidikan formal di berbagai negara (Young, 2008). Namun, pencapaian prestasi akademis yang diukur dengan skor nilai ujian nasional ataupun ulangan yang diselenggarakan oleh sekolah masih merupakan fenomena yang dominan dan cenderung menjadi pusat perhatian para pengamat pendidikan dan orang tua siswa. Mata pelajaran, seperti yang diidentifikasi oleh Mujiran (2006), bukan semata-mata merupakan bagian dari kurikulum. Mata pelajaran merupakan suatu konstruksi dari konsep-konsep yang perlu peran guru untuk tidak sekedar menjabarkan melainkan juga mengejawantahkan sehingga menjadi pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan nalar atau dalam konteks Kurikulum 2013 disebut dengan *higher order thinking*. Pengembangan dan penumbuhan daya nalar ini merupakan hambatan yang dialami oleh para guru di Indonesia. Penumbuhan dan pengembangan daya nalar ini bersemi dari proses belajar mengajar yang kreatif yang didorong oleh kemampuan guru untuk mengejawantahkan topik dari suatu yang hidup dan kontekstual serta berorientasi ke depan (Bashori, 2012). Dengan cara ini, maka pendidikan menjadi penggerak perkembangan bangsa ke depan seperti yang dikemukakan oleh Gower (2002) sebagai berikut:

“Education can and should help provide a better future for Indonesia by giving students power of thought- thought that allows people to plan and really consider what way or will arise as a consequence of their actions”.

Proses penumbuhan dan pengembangan nalar siswa tidak hanya secara spesifik menjadi ranah eksklusif mata pelajaran-mata pelajaran Sains melainkan juga pada mata pelajaran-mata pelajaran Ilmu sosial. Setiap mata pelajaran

merupakan konstruksi dari disiplin ilmu pengetahuan. Untuk memahaminya (bukan hanya mengerti) memerlukan metode berpikir dengan menerapkan *anti-thesa* dan *synthesa*. Dengan menggunakan metode berpikir *antithesa* baik guru maupun siswa melakukan pemilahan terhadap komponen-komponen yang menjadi bangunan konstruksi dari suatu konsep yang terkandung dalam setiap mata pelajaran. Dalam proses pemilahan proses pembedaan dari masing-masing komponen tersebut diuraikan. Penemuan perbedaan dari masing-masing komponen akan memberikan gambaran sisi lain dari komponen-komponen tersebut. Gambaran sisi lain adalah kesamaan (*commonality*) yang menyatukan komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang disebut dengan konsep. Ketika kesamaan tersebut telah ditemukan tahap berikutnya adalah melakukan *synthesa* untuk membangun suatu pemahaman tentang suatu konsep. Jika proses *antithesa* dan *synthesa* berlangsung secara berkelanjutan dari satu konsep ke konsep lainnya, maka pada saat itu terbentuk proses penalaran.

Sikap skeptis menjadi pondasi dalam penerapan metode berpikir *antithesa* dan *synthesa*. Sikap skeptis membangkitkan semangat keingintahuan pada diri guru dan siswa. Sikap ini terwujud dalam pertanyaan “mengapa sesuatu bisa terjadi” dan “bagaimana sesuatu tersebut bisa terjadi”. Jika sikap skeptis ini terjadi pada diri guru, maka hal itu akan membangkitkan semangat untuk mengembangkan metode-metode pengajaran yang lebih menarik, menyenangkan (*lively*), dan kontekstual. Argumentasi kontekstual didasarkan pada suatu asumsi bahwa setiap ilmu pengetahuan merupakan hasil dari generalisasi secara sistematis dan terukur terhadap kejadian-kejadian di sekitar kehidupan manusia. Kejadian tersebut dapat berupa fenomena alam maupun fenomena sosial kehidupan sosial manusia

Jika metode berpikir *antithesa* dan *synthesa* terjadi pada siswa, maka hal ini akan menstimulasi daya nalar mereka terhadap berbagai konsep dari berbagai mata pelajaran yang ditransfer oleh guru kepada mereka pada saat mereka mengikuti proses belajar mengajar. Efek dari proses stimulasi akan mendorong siswa melakukan asosiasi berbagai konsep dalam

kehidupan mereka. Pada saat mereka mencapai tahap tertentu dari serangkaian kegiatan proses belajar mengajar, kreativitas berpikir akan berkembang. Jika proses kreativitas ini berkembang secara eksplosif tidak menutup kemungkinan siswa akan menjadi inventor ilmu pengetahuan, jika mereka bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika mereka bergerak di bidang ekonomi tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi wirausahawan yang kreatif.

Kemampuan dalam akademik yang mendorong pengembangan nalar berpikir secara analitis yang dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek kehidupan yang selanjutnya mendorong pada penciptaan kemaslahatan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kaitan ini karakter relatif identik dengan intelektualisme ketika intelektualisme dapat memberikan kemaslahatan.

Peran transforming. Pelaksanaan peran *transforming* didasarkan pada suatu asumsi, bahwa setiap mata pelajaran mempunyai muatan nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan bersama baik dalam konteks kebangsaan maupun kemasyarakatan. Melalui proses akulturasi diharapkan akan mengubah orientasi siswa terhadap lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Wujud dari orientasi ini berupa perilaku peduli terhadap lingkungan fisik dan sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap mata pelajaran, baik itu mata pelajaran Agama, Sains, dan ilmu-ilmu sosial mengandung dua jenis sikap positif. Pertama, seperti yang disebutkan di atas, membangun sikap peduli terhadap lingkungan fisik dan sosial. Hasil dari sikap ini adalah harmonisasi kehidupan antara manusia dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Dalam konteks pembangunan karakter sikap ini merupakan modal awal untuk membangun suatu kemajuan bangsa. Kedua adalah orientasi progresif. Sikap ini mengarah pada upaya untuk mengarah pada kemajuan dan kemauan untuk bersaing. Sejarah menunjukkan bagaimana negara Jepang yang runtuh karena bom atom, negara Korea Selatan yang miskin sumber daya alam, dan Cina yang terbelenggu oleh sistem komunis akhirnya dapat menjadi negara industri maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan perwujudan dari orientasi progresif dari warganya

telah melalui proses pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

Penanaman nilai harmonis dan progresif merupakan dua peran *transforming* yang berlangsung dalam setiap proses pendidikan bersamaan dengan peran *transferring*, karena keduanya tidak dapat secara berbeda dipisahkan satu dengan lainnya. Peran *transferring* bertujuan untuk menstimulasi nalar (*cognitive competencies*), sedangkan peran *transforming* ditujukan untuk menstimulasi perasaan (*affective competencies*). Dalam menjalankan peran sebagai anggota masyarakat keduanya saling melengkapi satu dengan lainnya. Sensitivitas terhadap kondisi sekitar tidak akan terjadi tanpa adanya kemampuan untuk menginterpretasi melalui penalaran. Hal ini berarti bahwa orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi diharapkan mempunyai sensitivitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

Peran *transcending*. Pencapaian hasil belajar tingkat tertinggi adalah kepercayaan pada suatu kebenaran yang hakiki. Proses *transcending* terwujud ketika terdapat keyakinan terhadap kebenaran hakiki tersebut. Jika pencapaian hasil proses pendidikan tidak dilandasi demi kebenaran hakiki, niscaya hanya mencerminkan kepentingan mereka yang berkuasa atau bahkan tanpa makna (*trivial*) (Peters, 1972; White, 2006). Dengan kebenaran hakiki ini, maka dalam proses pendidikan yang berlangsung di dalam kelas, guru dan siswa secara bersama-sama dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa fenomena sosial dan berbagai kejadian alam bersifat dinamis dan memerlukan interpretasi secara menyeluruh demi adanya pemahaman yang benar terhadap berbagai fenomena tersebut. Pemahaman yang benar, jika merujuk pada argumentasi Scheeffler, seperti yang dikutip Holma (2004), memberikan makna tanpa mengurangi makna terhadap suatu realitas. Kondisi ini menjadi tantangan perenial sepanjang realitas tersebut berkembang. Berkaitan dengan hal ini Young (2008) mengajukan pendapat sebagai berikut:

“As an aspect of modernization, mass education faced and still faces what might be described as the fundamental pedagogic issue: overcoming the discontinuity (sometimes expressed as a

conflict) between the formal, codified, theoretical and, at least potentially, universalizing knowledge of the curriculum that students seek to acquire and teachers to transmit, and the informal, local, experiential and everyday knowledge that pupils (or students) bring to school”

Dalam konteks ini kebenaran hakiki terhadap suatu realitas tidak bersifat absolut. Namun, terminologi kebenaran hakiki ditujukan untuk membentuk suatu pemahaman aksiologis yakni dengan mempertimbangkan sistem tata nilai akademis dan religius. Unsur religius sengaja dicantumkan sebagai bagian dari konteks pemahaman aksiologis karena kebenaran hakiki membuka kesadaran dari keberadaan kita dalam suatu kebersamaan maupun kesendirian yang merupakan kehendak dan diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua yang ada di dunia ini tidak akan mempunyai makna kebenaran jika tidak mempunyai keterkaitan dengan hakiki kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran Ketuhanan (*divine truth*).

Kebenaran hakiki merupakan proses interaktif antara realitas dan teori. Implikasi dari hal ini adalah untuk mendapatkan kebenaran hakiki melalui proses *transcending* guru dan siswa melakukan proses deduktif dan induktif secara interaktif. Dengan proses deduktif guru dan siswa melakukan artikulasi dan penjabaran premis dari konsep ke dalam realitas sekitar mereka. Dengan proses induktif mereka menggeneralisasikan realitas sekitar mereka menjadi prinsip-prinsip umum.

Simpulan dan saran

Simpulan

Revolusi mental seperti yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi pada saat beliau masih menjadi calon presiden merupakan suatu proses pendidikan. Proses pendidikan yang dimaksud adalah pembentukan dan pengembangan karakter.

Pembentukan dan pengembangan karakter sebagai suatu proses pendidikan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional yang berlaku. Hal ini karena pendidikan nasional menjadi rujukan untuk mengukur relevansi pendidikan karakter tersebut. Di samping itu, pendidikan karakter tidak hanya berlaku demi pendidikan itu sendiri,

melainkan juga untuk mempersiapkan individu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan dirinya dan keberlangsung bangsanya.

Dalam skenario yang lebih makro makna pembentukan karakter merupakan refleksi sosiologis, politik, dan ekonomis. Refleksi sosiologis terwujud dalam kehidupan sosial yang harmonis, sedangkan refleksi politik terwujud dalam kehidupan yang demokratis, dan refleksi ekonomi terwujud dalam kemampuan untuk memproduksi untuk meningkatkan kemaslahatan.

Dalam pembentukan dan pengembangan karakter tersebut, peran guru tidak bisa diabaikan. Guru bahkan memegang peran utama, walaupun bukan satu-satunya. Profesionalisme guru merupakan faktor dominan jika dalam mengajar guru harus melakukan tiga peran, yakni peran *transferring*, *transforming*, dan *transcending*. Dalam proses pendidikan ketiganya bersifat *mutually inclusive*. Artinya walaupun mempunyai tujuan yang berbeda tetapi ketiganya merupakan perwujudan dari manusia yang berkarakter.

Saran

Pendidikan karakter sebagai bagian dari intervensi kebijakan pendidikan harus secara linier merujuk pada suatu kebijakan. Dalam konteks Kabinet Kerja rujukan kebijakan yang dimaksud adalah Nawa Cita. Oleh karena itu, penjabaran pendidikan karakter baik dalam rangka pengembangan kompetensi guru maupun pengembangan kurikulum perlu untuk menjabarkan pesan-pesan yang terkandung pada Nawa Cita.

Nawa Cita adalah suatu strategi pembangunan yang tidak secara eksklusif hanya berkenaan dengan pendidikan, tetapi juga menyangkut berbagai sektor pembangunan. Namun demikian titik tolak bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor lain adalah manusia Indonesia berpendidikan dan mencerminkan kompetensi yang dimiliki. Implikasi dari pernyataan ini pendidikan menjadi kunci. Oleh karena itu pendidikan karakter perlu untuk

merefleksi berbagai dimensi, sehingga manusia Indonesia yang berkompentensi telah mencerminkan kompetensi intelektual dan karakter yang relevan dengan berbagai target program pembangunan.

Guru sebagai pemegang peran dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter siswa sebagai generasi penerus perlu memperluas cakrawala pedagogis dengan mempertimbangkan peran *transferring*, *transforming*, dan *transcending* dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan mengembangkan metode belajar. Dalam rapat pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2014 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan bahwa program-program pelatihan dalam penerapan Kurikulum 2013 perlu juga mencakup materi-materi budaya sekolah yang mengarah pada penciptaan dan penumbuhan budaya belajar yang bersifat progresif. Dalam hal ini, peran *transferring*, *transforming*, dan *transcending* dapat dijadikan bagian dari pengembangan pendekatan dalam mengajar dalam rangka membentuk budaya belajar yang progresif.

Kurikulum sebagai rujukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bukan dokumen statis yang tabu dengan penyempurnaan. Pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan siswa untuk berperan merealisasikan dan menjamin keberlangsungan program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah mengharuskan untuk selalu menyesuaikan terhadap tuntutan program pembangunan. Konsekuensinya, kurikulum sebagai rujukan perlu untuk selalu disempurnakan. Penyempurnaan tidak harus bersifat radikal, tetapi dapat dilakukan secara *incremental* dengan melihat secara cermat standar kompetensi dan standar isi yang tidak lagi relevan dengan tuntutan pembangunan. Program pelatihan guru dan penyediaan sarana disesuaikan dengan penyempurnaan standar kompetensi lulusan dan standar isi tersebut.

Pustaka Acuan

- Abduhzein, M. 28 Juni 2014. Revolusi mental, mulai dari mana. *Kompas* hlm. 6.
- Atwater, M. M. 2010. Multicultural Science Education and Curriculum Materials. *Science Activities*, hlm. 47. 103–108.
- Avianni. N. 1 Juni 2014. Momentum Revolusi Mental. *Media Indonesia* hlm. 1.
- Bagir, H. 2 Oktober 2014. Strategi Kebudayaan dan Revolusi Mental. *Kompas* hlm. 7.
- Bashori, K. 30 Januari 2012. Membangun Budaya Kreatif di Sekolah. *Media Indonesia*. 4.
- Behrman, J. R. & Birdsall, N. 1987. Comment on Returns to Education: A Further International Update. *The Journal of Human Resources*. 22 (4) hlm. 603-606.
- Buchen, I. H. 2000. A Radical Vision for Education. *The Futurist*; 34(3) hlm. 30-34.
- Denicolo, P. M. & Pope, M. 2005. Perspectives on the Teaching Profession or Relative Appraisal dalam Pam M. Denicolo and Michael Kompf. *Teacher Thinking and Professional Action*. New York: Routledge hlm. 20-29.
- Denzin, N.K. 2005. Symbolic Interactionism and Ethnomethodology: A Proposed Synthesis dalam Sean P. Hier (editor). *Sociological Thought: Themes and Theories*. Toronto: Canadian Scholars' Press Inc. hlm. 123-136.
- Dewey, J. 2001. *Democracy and Education*. Hazleton: the Pennsylvania State University.
- Di tella, T.S. 1985. Political Powers and Class Structur dalam Eisenstadt.S.N. dan Helle, H.J. (editor). *Macro-Sociological Theory: Perspective on Sociological Theory*. Volume. 1. London: Sage Publication Ltd. 103-117.
- Farenga, S. J. & Ness, D. (editor). 2005. *Encyclopedia of Education and Human Development* . New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Farrelly, C. 2004. *Contemporary Political Theory*. London: Sage Publication Ltd.
- Gower, S.M. 21 Oktober 2002. Problem-Solving Ability Here Still Poor. *The Jakarta Post* hlm. 6.
- Holma, K. 2004. Plurealism and Education: Israel Scheffler's Synthesis and its Presumable Educational Implications. *Educational Theory*. 54(4) hlm. 419-430.
- Iacovo, B. D. 2009. Curriculum Reform and 'Quality Education' in China: An overview. *International Journal of Educational Development*, 29, hlm. 241-249.
- Indriyanto, B. 2014. "Maksimalisasi Tujuan Pedagogis dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Teknodik*. 18 (2) hlm. 113-124.
- Kumar, M. 2006. Constructivist Epistemology in Action. *The Journal of Educational Thought*. 40 (3) hlm. 247-267.
- Massardi, Y.A. 2 Desember 2014. Revolusi kebudayaan. *Kompas* hlm. 6.
- Moore, R. & Muller, J. 1999. The Discourse of 'Voice' and the Problem of Knowledge and Identity in the Sociology of Education. *British Journal of Sociology of Education*. 20 (2), hlm.189-206.
- Mujiran, P. 4 Oktober 2006. Karut-Marut Kurikulum 2006. *Media Indonesia*, hlm. 2.

- Nelson, A. R. 2001 *Education and Democracy: The Meaning of Alexander Meiklejohn* Madison: The University of Wisconsin Press.
- Perrin, A. J. 2005. Political Microcultures: Linking Civic Life and Democratic Discourse, *Social Forces*. 84(2) hlm. 1049-1082.
- Peters, R.S. 1972. Education and The Educated Man dalam R. F. Dearden, P.H. Hirst dan R.S.Peters. *Education and the Development of Reason*. London: Routledge & Kegan Paul hlm. 2-13.
- Pybas, K. 2004. Liberalism and Civic Education. *Perspectives on Political Science*, 33(1) hlm. 18-29.
- Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge: The Harvard University press.
- Rescher, N. 2002. *Fairness: Theory & Practice of Distributive Justice*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Richardson, G. 2008. Caught Between Imaginaries: Global Citizenship Education and the Persistence of the Nation dalam Ali A. Abdi, Lynette Shultz. (editor). *Educating for Human Rights and Global Citizenship*. Albany: State University of New York Press, hlm. 55-64.
- Strickland, B. R. (editor). 2001. *Gale Encyclopedia of Psychology (2nd edition)*. Farmington Hills: Gale Group.
- Suharno, I. N. 20 Agustus 2013. Musyawarah untuk Profesionalisme Guru. *Republika*, hlm. 5.
- Tambunan, M. 2000. Indonesia's New Challenges and Opportunities: Blueprint for Reform After the Economic Crisis. *East Asia: An International Quarterly*. 18(2), hlm. 50-116.
- Vandenbergh, V. 1999. Economics of Education. The Need to Go Beyond Human Capital Theory and Production Function Analysis. *Educational Studies*. 25 (2) hlm. 129-143.
- Westheimer, J. & Kahne, J. 2004. What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*. 41 (2), hlm. 237-269.
- White, J. 2006. The Puritan Origins of the 1988 School Curriculum in England dalam Alex Moore, *Schooling, Society and Curriculum*. London: Routledge.
- Widodo, J. 10 Mei 2014. Revolusi Mental. *Kompas*, hlm. 6.
- Windham, D. M. & Chapman, D. W. 1990. *The Evaluation of Educational Efficiency: Constraints, Issues, and Policies*. Greenwich: JAI Press.
- Yeager, E. A. & Silva, D. Y. 2002. Activities for Strengthening the Meaning of Democracy for Elementary School Children. *The Social Studies*. 93 (1), hlm. 18-22.
- Young, M. F. D. 2008. *Bringing Knowledge Back in: From Social Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education*. London: Routledge.